

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis dengan pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan akan ditampilkan secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa perangkat lunak IBM SPSS versi 22.0. Adapun penjelasan hasil penelitian dan pembahasan masing-masing variabel sebagai berikut ini:

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Klaten. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang dapat memberikan pendapat tentang pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada bulan November 2017, peneliti berhasil mengumpulkan 100 kuesioner yang dapat disebar. Dari 100 kuesioner yang disebar, keseluruhan kuesioner ini telah memenuhi kriteria dan tidak terdapat kuesioner yang tidak diisi lengkap sehingga keseluruhan kuesioner dapat diolah dengan baik.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengisian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner disebar	100	100%
Kuesioner yang memenuhi kriteria	100	100%
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber : Data primer diolah tahun 2017

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1	Perempuan	66
2	Laki-laki	34
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden yang banyak berpartisipasi dalam kuesioner berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 66 responden atau 66%. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dengan presentase 34%. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari usia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden
1	< 20 tahun	2
2	20-30 tahun	40
3	31-40 tahun	29
4	41-50 Tahun	20
5	> 50 tahun	9
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Karakteristik responden berdasarkan usia tersebut menjelaskan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Responden terbanyak dalam mengisi kuesioner adalah yang berusia 20-30 tahun dengan jumlah 40 orang atau dengan presentase 40%. Berikutnya responden yang berpartisipasi adalah usia 31-40 tahun yang berjumlah 29 orang dengan presentase sebesar 29%. Selanjutnya dengan responden dengan usia 41-50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 20 orang atau dengan presentase sebesar 20%. Responden selanjutnya yaitu dengan usia > 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 9 orang atau sebesar 9%. Responden yang paling sedikit mengisi kuesioner adalah yang berusia < 20 yang hanya berjumlah 2 responden atau sebesar 2%. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari jenjang pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden
1	< SMA	3
2	SMA/SMK	33
3	D1	3
4	D3	25
5	S1	36
6	S2	0
7	S3	0
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan merupakan responden yang ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner. Menurut data jenjang pendidikan di atas, responden terbanyak yang ikut berpartisipasi adalah responden yang berjenjang S1 yaitu berjumlah 36 orang atau sebesar 36%. Responden yang banyak berpartisipasi selanjutnya yaitu responden yang berjenjang SMA/SMK yang berjumlah 33 orang atau sebesar 33%. Selanjutnya diikuti oleh responden yang berjenjang pendidikan D3 dengan jumlah 25 orang atau sebesar 25%. Responden berikutnya yang berpartisipasi dengan jumlah 3 orang atau sebesar 3% pada masing-masing jenjang adalah responden yang berjenjang dibawah SMA dan jenjang D1. Sedangkan karakteristik responden dilihat dari jenis Wajib Pajak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

No	Wajib Pajak	Jumlah Responden
1	Badan	65
2	Pribadi	35
Jumlah		100

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan data tabel di atas responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner juga dapat dilihat dari jenis Wajib Pajaknya. Responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang merupakan Wajib Pajak badan dengan jumlah responden sebanyak 65 orang atau sebesar 65%. Sedangkan untuk responden yang merupakan Wajib Pajak pribadi hanya sebanyak 35 orang atau sebesar 35%.

2. Uji Kualitas Data

1. Validitas

Uji validitas untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Variabel dapat dikatakan valid apabila nilai *component matrix* memiliki tingkat signifikan lebih dari atau sama dengan 0,50 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Seluruh kuesioner yang diuji terdiri dari 5 variabel dengan masing-masing variabel terdiri dari 3 sampai dengan 7 pertanyaan. Masing-masing indikator dalam pertanyaan digunakan untuk mengukur tingkat perencanaan

pajak Wajib Pajak. Untuk mengukurnya, hasil analisis dapat diperoleh dari nilai *pearson correlation* yang dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas pada Semua Variabel

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan Hasil
1	UP1	0,615	VALID
2	UP2	0,544	VALID
3	UP3	0,647	VALID
4	UP4	0,723	VALID
5	UP5	0,723	VALID
6	UP6	0,648	VALID
7	UP7	0,545	VALID
8	SP1	0,638	VALID
9	SP2	0,698	VALID
10	SP3	0,646	VALID
11	SP4	0,695	VALID
12	SP5	0,689	VALID
13	SP6	0,549	VALID
14	SP7	0,660	VALID
15	L1	0,753	VALID
16	L2	0,773	VALID
17	L3	0,785	VALID
18	L4	0,756	VALID

No	Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan Hasil
19	L5	0,715	VALID
20	MWP1	0,720	VALID
21	MWP2	0,692	VALID
22	MWP3	0,674	VALID
23	MWP4	0,737	VALID
24	MWP5	0,711	VALID
25	TP1	0,830	VALID
26	TP2	0,814	VALID
27	TP3	0,796	VALID

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 4.6 pada variabel *tax planning* masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat dilihat pada tabel 4.6 pada variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 4.6 pada variabel administrasi perpajakan masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 4.6 pada variabel *loopholes* masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Berdasarkan tabel di atas, suatu indikator pertanyaan akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* lebih dari atau sama dengan 0,50. Dapat di lihat pada tabel 4.6 pada variabel moral Wajib Pajak masing-masing indikator pertanyaan menunjukkan skor **lebih dari 0,50**, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dapat dikatakan **VALID**.

Kesimpulan dari data tabel 4.6 di atas dapat dilihat sebaiknya seluruh indikator pertanyaan yang diuji lebih dari atau sama dengan 0,50 dapat dikatakan valid. Indikator pertanyaan yang telah diuji pada masing-masing variabel menunjukkan skor total **lebih dari 0,50** maka seluruh item dapat dikatakan **VALID**.

2. Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat pengukur untuk mengukur dengan konsisten dan stabil (Jogiyanto,

2016). *Cronbach's Alpha* adalah koefisien reliabilitas yang dapat mengidentifikasi seberapa bagus butir pernyataan atau pertanyaan terkolerasi secara positif antara yang satu dengan yang lain. Setiap item pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar atau sama dengan 0,70 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil pengukuran reliabilitas semua variabel disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas Pada Semua Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan UU	0,752	RELIABEL
2	Administrasi Perpajakan	0,758	RELIABEL
3	<i>Loopholes</i>	0,811	RELIABEL
4	Moral Wajib Pajak	0,742	RELIABEL
5	<i>Tax Planning</i>	0,740	RELIABEL

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat sebaiknya seluruh variabel yang diuji memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari atau sama dengan 0,70 dapat dikatakan reliabel. Seluruh variabel yang telah diuji pada masing-masing menunjukkan skor total **lebih dari 0,70** maka seluruh item pertanyaan dapat dikatakan **RELIABEL** dari waktu ke waktu.

3. Analisis Data dan Uji Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standard deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Tot_UUP	100	24	8	32	22.40	4.566	20.848
Tot_SP	100	11	24	35	29.70	2.823	7.970
Tot_L	100	16	4	20	12.90	2.564	6.576
Tot_MWP	100	11	12	23	17.56	2.199	4.835
Tot_TP	100	9	6	15	11.06	1.613	2.602
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel. Adapun hasil dari masing-masing pengujian menunjukkan bahwa sebagai berikut:

- a. Variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan (X) memiliki range 24; memiliki nilai minimum 8; nilai maximum 32; nilai rata-rata (mean) 22,4; simpangan baku (*standard deviation*) 4,566; dan nilai *variance* 20,848.

- b. Variabel administrasi perpajakan (X) memiliki range 11; memiliki nilai minimum 24; nilai maximum 35; nilai rata-rata (mean) 29,70; simpangan baku (*standard deviation*) 2,823; dan nilai *variance* 7,970.
- c. Variabel *loopholes* (X) memiliki range 16; memiliki nilai minimum 4; nilai maximum 20; nilai rata-rata (mean) 12,90; simpangan baku (*standard deviation*) 2,564; dan nilai *variance* 6,576.
- d. Variabel moral Wajib Pajak (X) memiliki range 11; memiliki nilai minimum 12; nilai maximum 23; nilai rata-rata (mean) 17,56; simpangan baku (*standard deviation*) 2,199; dan nilai *variance* 4,835.
- e. Variabel *tax planning* (Y) memiliki range 9; memiliki nilai minimum 6; nilai maximum 15; nilai rata-rata (mean) 11,06; simpangan baku (*standard deviation*) 1,613; dan nilai *variance* 2,602.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Data berdistribusi normal adalah data yang baik. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,97958969
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,043
	Negative	-,035
Kolmogorov-Smirnov Z		,431
Asymp. Sig. (2-tailed)		,992

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari atau sama dengan 0,05 atau 5%. Berdasarkan dari data tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar **0,992 atau lebih dari 0,05**. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini **TERDISTRIBUSI NORMAL**.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai

$tolerance > 0,10$ atau $VIF < 10$ maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10
UJI MULTIKOLINEARITAS

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,817	1,489		1,892	,061		
	UP	,063	,031	,183	2,051	,043	,837	1,195
	SP	-,005	,050	-,008	-,093	,926	,816	1,226
	L	,109	,055	,178	1,998	,049	,841	1,188
	MWP	,317	,066	,442	4,778	,000	,777	1,287

a. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 4.10 di atas, variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan menunjukkan nilai $VIF 1,195 < 10$ maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel administrasi perpajakan menunjukkan nilai $VIF 1,226 < 10$ maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel *loopholes* menunjukkan nilai $VIF 1,188 < 10$ maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Variabel moral Wajib Pajak menunjukkan nilai $VIF 1,287 < 10$ maka data pada variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menunjukkan hasil nilai **VIF masing-masing variabel < 10** maka penelitian ini **TIDAK TERJADI MULTIKOLINEARITAS**.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig lebih dari atau sama dengan 5%. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,497	,717		,694	,489
	UP	,005	,015	,034	,304	,762
	SP	,016	,024	,075	,669	,505
	L	-,030	,026	-,128	-1,158	,250
	MWP	,004	,032	,016	,136	,892

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan pada data tabel 4.11 di atas, pada variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar $0,762 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel administrasi perpajakan menunjukkan nilai sig sebesar $0,505 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel *loopholes* menunjukkan nilai sig sebesar $0,250 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel moral Wajib Pajak menunjukkan nilai

sig sebesar $0,892 > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai **sig masing-masing variabel lebih dari 0,05 atau 5%** maka penelitian ini **TIDAK TERJADI HETEROSKEDASTISITAS.**

3. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, mengukur pengaruh semua variabel dependen antara 0 hingga 1, dan untuk mengukur proporsi variasi variabel terkait yang dijelaskan oleh variabel penjelas. Ketentuan untuk koefisien determinasi adalah nilai koefisien *Adjusted R Square* mendekati angka 1 maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,607 ^a	,368	,342	1,27809

a. Predictors: (Constant), MWP, L, UP, SP

b. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 4.12 di atas, hasil dari besarnya koefisien determinasi adalah 0,342 atau 34,2%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak dapat memengaruhi variabel dependen yaitu *tax planning* sebesar 34,2%. Sedangkan sisanya 65,8% (100% - 34,2%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

b. Hasil Uji Nilai F

Uji nilai F merupakan uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah serentak variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai sig kurang dari atau sama dengan alpha 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13

Uji Nilai F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90,457	4	22,614	13,844	,000 ^a
	Residual	155,183	95	1,634		
	Total	245,640	99			

a. Predictors: (Constant), MWP, L, UP, SP

b. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan data tabel 4.15 di atas, menunjukkan hasil nilai F sebesar 13,844 dengan nilai sig 0,000 kurang dari alpha 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax planning*.

c. Hasil Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk menguji hipotesis dengan melihat nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen atau uji nilai t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.14

UJI PARSIAL (UJI T)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	(Constant)	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,817	1,489		1,892	,061		
	UP	,063	,031	,183	2,051	,043	,837	1,195
	SP	-,005	,050	-,008	-,093	,926	,816	1,226
	L	,109	,055	,178	1,998	,049	,841	1,188
	MWP	,317	,066	,442	4,778	,000	,777	1,287

a. Dependent Variable: TP

Sumber: Data primer diolah tahun 2017 menggunakan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengujian atas hiotesis di atas model yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 2,817 + 0,063X_1 - 0,005X_2 + 0,109X_3 + 0,317X_4 + \varepsilon$$

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan data tabel 4.16 di atas, nilai t variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan memiliki nilai **sig (0,043) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 2,051**. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis pertama (**H1**) **DITERIMA**.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan data tabel 4.16 di atas, nilai t variabel administrasi perpajakan memiliki nilai **sig (0,926) > α (0,05) dan arah koefisien regresi negatif -0,093**. Dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis kedua (**H2**) **DITOLAK**.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan data tabel 4.16 di atas, nilai t variabel *loopholes* memiliki nilai **sig (0,049) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 1,998**. Dapat disimpulkan bahwa variabel *loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis ketiga (**H3**) **DITERIMA**.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Berdasarkan data tabel 4.16 di atas, nilai t variabel moral Wajib Pajak memiliki nilai **sig (0,000) < α (0,05) dan arah koefisien regresi positif 4,778**. Dapat disimpulkan bahwa variabel moral Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax planning*. Dengan demikian, hipotesis keempat (**H4**) **DITERIMA**.

Tabel 4.15

RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

KODE	HIPOTESIS	HASIL
H1	Pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap <i>tax planning</i> .	Diterima
H2	Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap <i>tax planning</i> .	Ditolak
H3	<i>Loopholes</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax planning</i> .	Diterima
H4	Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax planning</i> .	Diterima

Sumber : Hasil Analisis Data

4. Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah pemahaman Undang-Undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemahaman Undang-Undang perpajakan, *loopholes*, dan moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*). Sedangkan variabel administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*). Adapun pembahasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pemahaman Undang-Undang perpajakan terhadap *tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis pertama adalah pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2008); Fad' aq (2013), Wibowo dan Mangoting (2013); serta penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) yang menyatakan bahwa Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Kadarianty (2012) tidak mendukung penelitian ini.

Undang-undang perpajakan merupakan gabungan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan perpajakan. Namun, pada kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dari itu di dalam pelaksanaannya selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan perpajakan lainnya). Pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak memiliki peran penting untuk mengetahui celah-celah yang ada di dalam Undang-Undang

perpajakan. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai Undang-Undang perpajakan, maka semakin banyak pula Wajib Pajak mengetahui celah di dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga Wajib Pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.

2. Administrasi perpajakan terhadap *tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis kedua adalah administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fad'aq (2013); Nathania (2016); serta penelitian Kadarianty (2012) yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Namun, penelitian ini konsisten dengan penelitian Indrawati dan Budiwitaksono (2015) dalam hasilnya yang menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.

Menurut Herlina dan Toly (2013), pembayaran sanksi administrasi perpajakan yang tidak seharusnya merupakan pemborosan sumber daya bagi Wajib Pajak. Adanya sanksi administrasi perpajakan seharusnya mampu menjadikan seseorang takut lalu Wajib Pajak akan memotivasi dirinya agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi pajak yang dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang bisa dilakukan, sehingga Wajib Pajak dapat merencanakan pajaknya dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini diduga disebabkan karena terlalu rendahnya sanksi administrasi yang berlaku, sehingga Wajib Pajak disini lebih terfokus pada meminimalkan jumlah pajak yang disetorkan dibandingkan sanksi administrasi yang akan dikenakan.

3. *Loopholes terhadap tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga adalah *loopholes* berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fad'aq (2013); Herlina dan Toly (2013); serta penelitian Agneza (2017) yang dalam hasilnya menyatakan bahwa *loopholes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Lily (2016) tidak mendukung penelitian ini.

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar pajak sama sekali. Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi Wajib Pajak untuk menentukan *loopholes*. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin dapat memanfaatkan *loopholes* dan semakin terdorong untuk melakukan perencanaan pajak.

4. Moral Wajib Pajak terhadap *tax planning*

Hasil penelitian pada hipotesis yang keempat adalah moral Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013); Wibowo dan Mangoting (2013); serta penelitian Nathania (2016) yang menyatakan bahwa moral Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak. Sedangkan penelitian oleh Anissa dan Handayani (2015) tidak mendukung penelitian ini.

Moral Wajib Pajak berpengaruh positif karena menentukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam peraturan perpajakan. Adanya moral Wajib Pajak yang baik dapat memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan tidak menyalahi aturan yang ada dalam perundang-undangan. Jika Wajib Pajak semakin memiliki moral yang baik, maka semakin baik pula Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Sesuai teori atribusi yang mengkaji perilaku seseorang dari faktor internal dan eksternalnya, moral adalah kesadaran yang timbul dari dalam hati nurani seseorang. Moral yang baik tentu akan menghasilkan pribadi yang baik pula.